



## **SISTEM NILAI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ADIL DAN BERKELANJUTAN: ANALISIS AKSIOLOGI ISLAM**

**Husni Shabri<sup>\*1</sup>, Ivahzada Marella Edgina<sup>2</sup>, Muhammad Said<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Korespondensi: Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat Timur., Tangerang Selatan, Banten 15412

e-mail: husnishabri21@mhs.uinjkt.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pembangunan ekonomi adil dan berkesinambungan melalui system nilai-nilai dengan analisis aksiologi Islam. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literature dari berbagai sumber berupa buku, artikel jurnal dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi adil, merata dan berkesinambungan belum mampu diwujudkan oleh pemerintah secara maksimal, pembangunan hanya terkonsentrasi pada pusat kota saja sehingga masih banyak daerah-daerah yang dikategorikan sebagai desa tertinggal, terbatasnya sarana dan prasarana dalam aktifitas perekonomian, lembaga pendidikan yang tidak memadai dan masih sulitnya jaringan komunikasi. Pembangunan ekonomi yang sudah dilakukan saat ini belum bisa dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia hanya sebagai kecil saja yang menikmatinya, sehingga kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum bisa terwujud. Zakat dan Wakaf adalah instrument keuangan merupakan social fund dalam sistem ekonomi Islam yang dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan dan distribusi kekayaan dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan.

**Kata Kunci:** Aksiologi Islam, Sistem Nilai, Pembangunan Ekonomi.

**Abstract:** *The purpose of this study is to analyze aspects of equitable and sustainable economic development through a system of values with Islamic axiological analysis. The research method uses qualitative methods with data collection techniques using literature studies from various sources in the form of books, journal articles and other documents. The results show that fair, equitable and sustainable economic development has not been able to be realized optimally by the government, development is only concentrated in the city center so that there are still many areas that are categorized as underdeveloped villages, limited facilities and infrastructure in economic activity, educational institutions that do not adequate and the communication network is still difficult. The economic development that has been carried out at this time has not been able to be felt and enjoyed by the entire Indonesian people, only a small number of people enjoy it, so that welfare and justice for all Indonesian people cannot be realized. Zakat and Waqf are financial instruments which are social funds in the Islamic economic system that can be used in alleviating poverty and distributing wealth in realizing equity and justice.*

**Keywords:** *Islamic Axiology, Value System, Economic Development.*

### **PENDAHULUAN**

Secara umum, pembangunan ekonomi mengacu pada proses pertumbuhan ekonomi dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan

ekonomi menggambarkan kenaikan kapasitas produksi di suatu negara. Pembangunan berkelanjutan menggabungkan vitalitas ekonomi, pemeliharaan lingkungan, dan

kesetaraan sosial. Dalam pembangunan berkelanjutan, pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan yang tinggi dan positif, tetapi juga stabilitas pertumbuhan tersebut. Vitalitas ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat saat ini dan generasi mendatang.

Pembangunan ekonomi tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi masih membutuhkan revisi aspek kelembagaan. Salah satu indikator yaitu kinerja pembangunan, yang sering diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Mekanisme penghitungan perkembangan ekonomi yang didasarkan pada PDB, menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekali, sehingga tidak mencerminkan keadaan di tingkat mikro serta siapa sesungguhnya yang menikmati perkembangan tersebut. Hasil analisis dari kajian *Alternative Narrative* sudah meyakinkan kalau pertumbuhan ekonomi yang besar tidak menjamin pencapaian tujuan akhir dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perekonomian yang mengandalkan ekspor bahan mentah (resource-based economy), belum pasti menghasilkan kesejahteraan serta kebahagiaan untuk semua masyarakat (Pradiptyo et al., 2018). Masih banyak masyarakat yang hidupnya serba kekurangan, jika terjadi pertumbuhan ekonomi rendah bahkan negatif atau terjadi resesi ekonomi maka akan berdampak langsung terhadap masyarakat ini.

Pembangunan ekonomi adalah suatu aktifitas terencana dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan. Pembangunan di negara-negara berkembang pada pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda diantara mereka. Perbedaan ini telah menjadi paradigma atau pandangan yang mendunia dalam melaksanakan pembangunan (Sakirno, 2009). Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai “*economic development is growth plus change*” atau

pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Almizan, 2016).

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2014-2020 mengalami kontraksi pada tahun 2020 hal ini disebabkan terjadinya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan aktifitas perekonomian anjlok. Berikut data pertumbuhan ekonomi:



Gambar 1  
Sumber: Data BPS (2021)

Pada kurun waktu 5 tahun pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan PDB menjadi -2,07% dimana sebelumnya sebesar 5,02%. Penurunan nilai PDB akan berdampak kepada masyarakat dengan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Ketidakberdayaan pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada 5% menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah dan ketidaksiapan dalam menghadapi gejolak ekonomi yang terjadi dan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam pembangunan ekonomi sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Ketika terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi maka masyarakat memiliki ketahanan dalam menghadapi ini.

Proses pembangunan ekonomi, memandang bahwa nilai-nilai agama, etika, moralitas adalah sebagai fondasi penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Kedua hal ini tidak dapat dianggap dinilai dari sisi normatif semata, namun merupakan hasil positif dari nilai-nilai keimanan yang terkandung dalam setiap individu. (Castellani, 2019). Pembangunan ekonomi Islam harus membangun kekuatan ummat (bangsa Muslim) untuk menghayati perannya sebagai khalifah Allah (SWT) di bumi dan sebagai 'umat menengah' untuk membawa umat manusia ke tatanan sosial yang adil yang dicita-citakan Islam, yaitu islam sebagai rahmatan li al-'alamīn (menjadi berkat bagi seluruh dunia dan semua manusia). Ini merupakan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad ﷺ ke dunia

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS Al-Anbiya’21:107).

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah (Abidin, 2012). Dalam pandangan ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi secara garis besar ditujukan untuk kesejahteraan materi, yang itu hanya berdimensi jangka pendek, atau dengan ungkapan lain hanya untuk kesejahteraan duniawi tanpa diimbangi dengan tujuan ukhrawi. Pemasukan istilah yang mencerminkan kepuasan ruhaniyah dalam fungsi ini tidak akan menimbulkan masalah matematis, karena sifatnya yang tidak berwujud. Di sisi lain Islam juga memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal (Naqvi, 1991)

Pembangunan tersebut tidak eksklusif pada perkembangan material individu dan masyarakat tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang semuanya mengarah pada kesejahteraan sosial-ekonomi maksimum serta ketertiban yang adil yang menghasilkan kebaikan tertinggi umat manusia, di dunia dan akhirat. Pembangunan ekonomi dalam Islam didefinisikan sebagai peningkatan yang

seimbang dan berkelanjutan dalam kesejahteraan material dan non-material manusia, pembangunan sebagai proses multi-dimensi yang melibatkan peningkatan kesejahteraan melalui kemajuan, reorganisasi dan reorientasi seluruh ekonomi dan sistem sosial, serta peningkatan spiritual, sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT melarang kegiatan perusakan di bumi seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk mengelola semua sumber daya alam, manusia, dan keuangan suatu negara untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan dalam jangka panjang, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus melestarikan lingkungan sehingga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tidak hanya pada saat ini, tetapi pada masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui keimanan, ilmu dan amal shaleh. Pahala untuk "berbuat baik" yang didasarkan pada petunjuk Allah dan harus disertai dengan "keyakinan", menghasilkan pembangunan berkelanjutan, keamanan dan daya hidup dalam masyarakat manusia. Allah melarang kegiatan perusakan di bumi seperti yang tersirat dalam Al Quran Surat Al Qasas ayat 77: “....janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Gagasan dari keseimbangan alam merupakan konsep inti dalam pandangan dunia Islam. Hal ini menyiratkan bahwa segala sesuatu di bumi seimbang, terdapat makanan dan sumber daya yang mencukupi, jika ada pemerataan dan keadilan distribusi, kondisi kesetaraan terpenuhi, maka tidak akan terjadi

kelangkaan sumber daya. Beberapa penyebab dari belum tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara berkembang adalah (1) pengabaian sumber daya manusia, sosial dan alam; (2) orang-orang miskin tidak memiliki akses ke sumber daya yang dimiliki negara. Jumlah buruh sangat tinggi. Bahkan mereka yang memiliki sebidang tanah tidak memiliki akses ke keuangan, teknologi, dll. Oleh karena itu mereka menjual tanahnya dan lebih memilih untuk menjadi buruh. (3) terjadinya korupsi yang banyak membuat orang lain kehilangan haknya atas sumber daya. (Al-Jayyousi, 2012).

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana sistem nilai dalam pembangunan ekonomi adil dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan melakukan analisis aksiologi Islam. Aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma dan menyelidiki hakekat nilai.

Pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara aksiologis, memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut cenderung memiliki fungsi yang sama; bertujuan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lewat berbagai macam tools yang tersedia kesamaan-kesamaan pada sebagian kaidah kedua ilmu ekonomi tersebut dalam mengatasi persoalan ekonomi, memang merupakan sebuah kecenderungan umum dalam aktifitas ekonomi yang sifatnya sunnatullah (Kahf, 1997).

Salah satu paradigma ekonomi yang memperoleh apresiasi secara luas dalam beberapa dasawarsa belakangan ini adalah paradigm islam. Paradigma ini muncul sebagai alat untuk menerobos sains (ilmu ekonomi) positivistik. Jika positivisme hanya mengenal realitas materi, maka paradigma islam mengenal realitas materi dan realitas lain (the others) yang melampaui matrealisme yaitu realitas spiritual (Muhammad, 2007).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengkaji tentang aksiologi Islam dalam pembangunan ekonomi adil dan berkelanjutan secara mendalam dan menyeluruh. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori dan informasi yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ada kemudian melakukan analisis, kemudian menguraikan, memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas yang digambarkan dalam empat langkah. Empat langkah tersebut meliputi pengumpulan data, data reduction, data display, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi Islam memiliki dasar, konsep dan paradigm yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional terjadi pemisahan antara agama dan ekonomi. Pemisahan ekonomi dari agama melahirkan paham sekularisme dalam ekonomi konvensional dan mengabaikan nilai-nilai atau norma dalam kegiatan ekonomi sehingga menghadirkan masalah masalah di dalam kehidupan masyarakat seperti kesenjangan pendapatan, kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam yang merupakan bagian integral atau bagian yang tidak bisa terpisahkan dari agama Islam. Semua aspek dalam ekonomi harus mengikuti ajaran Islam. Kegiatan ekonomi masyarakat terikat dengan norma dan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah).

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih terpusat pada daerah perkotaan saja, baik di ibu kota Negara, propinsi, kota/kabupaten dan di daerah yang berada disekitarnya. Kondisi ini masih jauh dari tujuan awal dan yang cita-citakan yaitu tujuan nasional kita yang menginginkan pemerataan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan yang kurang merata di Indonesia sudah banyak terjadi seperti masih ada desa-desa yang masih tertinggal yang jauh dari pembangunan dipertanian sehingga hal ini memberi ketidaknyaman bagi masyarakat ditempat tersebut tentu yang dapat menghambat aktivitas masyarakat. Daerah-daerah tertinggal belum ada listrik, jalan-jalan yang tidak memadai tentunya sangat menghambat aktivitas masyarakat didaerah tersebut.

Wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar yang belum mampu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun perekonomian Negara. Hal ini karena pembangunan yang sudah dilakukan tidak merata sehingga menyebabkan kurang adanya pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber daya alam di daerah tersebut yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka waktu panjang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di Indonesia yang belum merata dikarenakan pemerintah yang hanya menyediakan sarana prasarana dan fasilitas yang sifatnya kompleks hanya untuk daerah perkotaan, sehingga bagi masyarakat yang letaknya di daerah terpencil butuh waktu yang lama untuk menikmati dan mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. Beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang merata baik di Kota besar maupun dipelosok desa. Jika pembangunan sudah merata pada suatu desa seperti transportasi tentu aktivitas perekonomian di suatu desa tersebut dapat berjalan dengan baik. Pembangunan diharuskan merata di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang tidak adil dan merata menimbulkan masalah kesenjangan dan

ketimpangan dari aspek sosial ekonomi yang mencakup seperti pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, strata social dan kejahatan. Berdasarkan laporan BPS 2019 menunjukkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69% (9,99 juta) turun menjadi 6,56 % (9,86 juta) pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 % (15,15 juta) turun menjadi 12,60% (14,93 juta) pada September 2019, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak dibandingkan penduduk miskin di kota.

Kajian aksiologi ekonomi Islam akan membahas tentang ekonomi Islam dari aspek system nilai dan manfaat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi adil dan berkelanjutan.

Keseimbangan orientasi duniawiyah dan ukhrawiyah merupakan orientasi yang diidam-idamkan, khususnya dalam Islam. Berangkat dari orientasi yang seimbang antara duniawiyah (materi) dan ukhrawiyah (kepuasan non-materi) itulah Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Karena, menurut Islam, keadilan sosial adalah salah satu unsur penting dari dinamika sosial. Dalam konteks suatu perekonomian yang sedang tumbuh inilah "kue" pendapatan nasional dapat diperbesar demi kemungkinan masing-masing menerima secara adil dari pertumbuhan tersebut. Suatu lingkungan sosial yang di dalamnya setiap orang menikmati hasil pertumbuhan jelas lebih unggul dibandingkan dengan lingkungan sosial lainnya yang berisi orang-orang yang sebagian menikmati sementara yang lain menjadi korban (Naqvi, 1991).

Dengan demikian, kebijaksanaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dari suatu pertumbuhan ekonomi untuk semua manusia tanpa memandang secara diskriminatif antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja

melainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah. Memasukkan aspek ruhaniyah ini dalam pandangan Islam tidak akan menimbulkan masalah-masalah matematis, karena sifatnya yang abstrak sebab, yang dioptimalisasikan, sekalipun ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi neo-klasik, bukanlah arus konsumsi akan tetapi “nilai guna” yang berkaitan dengannya, yang ia sendiri adalah kualitas yang tidak berwujud. (Abidin, 2012).

Selanjutnya, maksimalisasi tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, tanpa mempedulikan dampaknya atas distribusi pendapatan dan kesejahteraan umum, tidak dapat menjadi sasaran utama dalam perekonomian Islam. Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata akan lebih baik daripada tingkat pertumbuhan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan distribusi yang merata. Namun demikian, yang lebih baik dari keduanya adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata. (Abidin, 2012). Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam diantaranya adalah melalui Zakat yang bersifat wajibah dan wakaf yang bersifat nafilah.

Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi dalam menggerakkan perekonomian jika dikelola dengan baik. Zakat diambil dari orang-orang yang mampu kemudian disalurkan kepada asnaf delapan yang diantara penerimanya adalah fakir dan miskin. Jika zakat dapat dikelola dengan baik, dimana penghimpunan dana zakat bisa dilakukan secara maksimal dan penyalurannya tepat sasaran maka akan dapat mengurangi angka kemiskinan. Demikian juga dengan wakaf, baik wakaf benda maupun uang, dapat digunakan untuk pergerakan ekonomi

produktif yang banyak mendatangkan manfaat secara material dan spiritual.

Zakat hukumnya wajib yang jumlah (nishab), waktu (haul) dan penerima zakat sudah ditentukan sedangkan Wakaf hukumnya tidak wajib atau sunnah yang jumlah, waktu dan penerima tidak ditentukan sehingga bisa fleksibel dalam penghimpunan dan penyalurannya. Objek wakaf akan tetap dijaga, dipelihara dan dikelola sehingga menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat secara berkelanjutan. Zakat dan wakaf merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada rabbnya. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim.

## KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi adil dan berkelanjutan adalah harapan seluruh masyarakat dalam mewujudkan kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia ini. Nilai-nilai ajaran Islam hendak selalu diaplikasi dalam proses pembangunan ekonomi agar kebahagiaan dan kesejahteraan yang diperoleh tidak hanya untuk dunia saja tapi juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian juga negara-negara sedang berkembang terus berupaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang sudah dilakukan, masih banyak masyarakat yang di daerah pedesaan yang perlu diperhatikan penyediaan dan pembangunan sarana prasarana, bahkan ada yang belum tersentuh oleh pembangunan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, A., Ng, A., Mahfudz, A. A., Pramanik, A. H., Ghani, G. M., & Ghani, G. M. (2018). *Islamic Economics Principles & Analysis*. ISRA.
- Abidin, Z. (2012). Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi. *Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah Atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam Atas Sistem Ekonomi Konvensional)*, 7(2), 356–

367. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/334>
- Al-Jayyousi, O. R. (2012). *Islam and Sustainable Development: New Worldviews*. Gower Publishing Limited.
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 203–222.
- Castellani, M. (2019). Does culture matter for the economic performance of countries? An overview of the literature. *Journal of Policy Modeling*, 41(4), 700–717. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.06.006>
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam (Pertama)*. Kencana.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice. In *Palgrave Studies in Islamic Banking, Finance, and Economics* (Vol. 6, Issue 1). <https://books.google.dz/books?id=XZs3DwAAQBAJ>
- Kahf, M. (1997). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Aditya Media.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam (Kelima)*. Rajawali Pers.
- Muhammad. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Graha Ilmu.
- Naqvi, S. N. H. (1991). *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, terj. Husin Anis. Mizan.
- Pradiptyo, R., Satria, D., Shohibuddin, M., Sulistyono, H., Radjawali, I., Puteri, J., & Maisyarah, S. (2018). Satu Indonesia; Strategi Pembangunan Berkelanjutan, Adil dan Mandiri. *Research Gate, October*, 0–45. <https://www.researchgate.net/publication/328201984>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sumantri, J. (2005). *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Sinar Harapan.
- Witjaksono, M. (2009). Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(1), 1–12. <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/issue/view/682>